

SMART GOVERNMENT MELALUI TRANSAKSI PEMBAYARAN SISTEM BARCODE DI PASAR PABAENG-BAENG KOTA MAKASSAR

Andi Iin Saputri^{1*}, Muhlis Madani², Abdi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to determine Smart Government through transaction Barcode Payment System at Pabaeng-baeng Market, Makassar City. Smart Government referred to the implementation of ICT ini public service in the field governance effectively. Meanwhile, Smart City in addition to covering administration government also deals with health services, transportation, education, and soon. The number of information in this study were 08 people. This study used qualitative with the type of phenomenological research that emphasized on the subjectivity of human life experience. Data collection techniques used methods of observation, interview and documentation. Data analysis used interactive analysis model. The result showed that Smart Government Through Barcode System Payment transaction at the Pabaeng-baeng Market in Makassar City had not fully implementation optimally this could be seen from the aspect of the Smart stage. Government through the payment transaction of the Barcode System in Pabaeng-baeng Market. This could be seen from the indicators (1) Simple (2) Moral (3) Reseponsiviness and (4)Transparaency.

Keyword: smart government, barcode system

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Smart Government Melalui transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar. *Smart Government* adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian ICT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Sedangkan, *Smart City* selain mencakup administrasi pemerintahan juga menangani layanan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 08 orang. Jenis penelitian ini menggunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi yaitu menekankan pada subyektivitas pengalaman hidup manusia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart Government Melalui transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal hal ini dilihat dari aspek tahapan Smart Government Melalui transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng hal ini dilihat dari indikator (1) *simple* (2) *Moral* (3) *Responsivitas* dan (4) *Transparansi*.

Kata Kunci: smart government, sistem barcode

* andiini@gmail.com

PENDAHULUAN

Smart Government merupakan salah satu elemen dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan *Smart City*. Secara umum, *Smart Government* adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian ICT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Sedangkan, *Smart City* selain mencakup administrasi pemerintahan juga menangani layanan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Pertanyaan seputar konsep penggabungan jalan keluar permasalahan layanan administratif di masyarakat dengan teknologi sudah menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia sejak lama. Hal itu juga lah yang kemudian mendorong munculnya istilah *e-government* di masa lalu. *E-Government* adalah konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan publik yang efisien, transparan, efektif dan akuntabel. *E-government* berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara

pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya.

Penerapan *e-government* di kota merupakan salah satu wujud program *Smart City* sebagai konsep dalam melengkapi tataa kelola pemerintahan yang baik dengan lebih kompeten, sehingga dapat mengoptimalisasikan penggunaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada sistem pemerintahan (*E-Government*), dengan tujuan tercipta lingkungan kerja yang efektif, efisien, serta transparan dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan, perkembangan sistem *e-government* khususnya di Kota Makassar secara kuantitas mulai meningkat namun secara kualitas belum memadai. Untuk lebih meningkatkan pengembangan *e-government* di Kota Makassar baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan *E-Government* terutama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal pemerintah maupun kepada masyarakat. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh penggunanya (Indrajit,

2004).

Keberadaan aspek-aspek di atas dapat memudahkan untuk membedakan jenis- jenis *e-Government* yang ada. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka jenis- jenis *e-Government* dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu 1) Publish / Publikasi, 2) Interact / Interaksi, 3) *Transact* / Transaksi (Indrajit, 2004). *Smart Governance* atau tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah salah satu bagian dari terwujudnya *Smart City*. Secara utuh *smart city* terdiri dari 6 dimensi pembentuk yaitu *smart governance*, *smart environment*, *smart living*, *smart people*, *smart mobility* dan *smart people* (Cohen, B., 2013). Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal juga dapat mengidentifikasi seberapa smart pemerintah dalam pengelolaan pemerintahannya. Gambaran *smart governance* dapat dilihat dari syarat-syarat untuk mewujudkannya, yang dimaksudkan agar kita mendapatkan gambaran yang jelas dan spesifik sehingga dengan mudah dapat menyusun rencana implementasinya.

E-Government adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dengan menggunakan teknologi telematika. Nijkamp (2009) mendefinisikan kota cerdas sebagai kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia (SDM), modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi. Menurut Di Maio (2010) yang dikutip oleh Ardiansyah (2014) dalam skripsinya bahwa Istilah *Smart City*, *Smart Government* atau *Smart Governance* ini telah digunakan dalam dua atau lima sampai enam tahun yang lalu oleh berbagai kalangan untuk menunjukkan seperangkat kapabilitas tambahan daripada kapasitas pemerintahan yang telah dimiliki untuk membuat batas kewenangannya lebih berkelanjutan dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan, serta dalam terminologi lingkungan.

Kenyataannya tantangan utama dari *Smart Governance* adalah pengintegrasian lintas yang berbagai teknologi, domain, wawasan perencanaan, dan tanggungjawab. Karena itu dapat disimpulkan bahwa *Smart Governance* adalah terkait masa

depan layanan publik, tentang efisiensi yang lebih besar, kepemimpinan komunitas, bekerja secara mobile dan perbaikan yang terus menerus melalui inovasi. *Smart Governance*, menurut Wilke (2007), "adalah singkatan untuk ansambel prinsip, faktor, dan kapasitas yang merupakan bentuk pemerintahan yang mampu mengatasi kondisi dan tuntutan dari pengetahuan masyarakat . Penulis lebih lanjut mengakui bahwa *Smart Governance* adalah tentang "mendesain ulang tata pemerintahan yang demokratis formal" sambil mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang dikembangkan secara historis dan ekonomi pasar bebas. Sing, gurmeet (2010) yang dikutip oleh Nurdin (2014) bahwa *Smart Governance* (Pemerintah cerdas) berfokus pada peran strategis negara dalam masyarakat dan dalam pengembangan desain institusional dan manajerial kapasitas untuk meningkatkan efektivitas prestasi negara. Mandat dari pemerintahan yang demokratis adalah menyediakan sejumlah layanan kepada warganya secara efisien, nyaman, adil, dan efektif. Hal ini dapat menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan warganya dan akan memfasilitasi pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Kata "*SMART*" menangkap atribut penting dari *good governance* Nurdin (2014) yaitu sederhana, moral, akuntabel, responsif, dan pemerintahan yang transparan. (a)Simple Sederhana bermakna warga mengharapkan berbagai hukum, peraturan, regulasi, proses, prosedur yang diformulasi oleh pemerintah mudah dipahami dan digunakan. Keberagaman hukum, prosedur dan persyaratan yang kompleks mendorong warga menjadi perantara (mediator) yang sehingga mempraktekkan korupsi. Untuk menghindari situasi yaitu dengan menerapkan pemerintahan yang menggunakan layanan "*single window*" atau "*one stop service*" untuk memfasilitasi warga mendapatkan layanan yang efisien. (b)Moral Kata moral dalam smart pemerintahan bermakna munculnya sistem baru pemerintahan yang berbasis nilai-nilai moral. Kejelasan proses agak lambat tetapi sangat esensial bagi ketahanan nilai-nilai yang diinginkan oleh prinsip *good governance*.

Beberapa proses seperti proses yang sistematis dalam reformasi pemilihan, penyederhanaan pemerintahan, peningkatan angka melek huruf, meningkatkan kesadaran dan partisipasi dapat bertahan lama untuk menunjukkan akibat harus dapat

terlewatkan. Pemeliharaan standar etika yang tinggi di dalam system dengan pemeriksaan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi kebijakan departemen, peradilan dan administrasi secara umum. Penggunaan teknologi akan menciptakan seorang yang memegang teguh moral pemerintah Moral juga mempersingkat ukuran di dalam kualitas *Smart Governance* sebagai parameter penting teradap akses kinerja elektronik pemerintahan.(c)Responsivitas.

Bermakna menjadi penuh perhatian kepada kebutuhan manusia dan dengan tindakan untuk menunjukkan urgensi dalam merespon kebutuhan. Termasuk kualitas layanan yang diberikan tepat waktu. Konsep penting yang dikembangkan untuk memastikan daya tanggap adalah *citizen charter*. *Citizen charter* adalah seperangkat jaminan oleh lembaga pemerintah atas kualitas layanan dan batas waktu pelayanan. TIK dapat memainkan peran yang signifikan dalam perbaikan kinerja pemberian layanan seperti yang dijanjikan dalam *citizen charter*. (d) Transparansi membawa esensi kebaikan ke dalam kehidupan publik seperti keadilan, bidang yang dimainkan, aturan hukum. Kebaikan ini memberikan manfaat untuk memberikan layanan dengan tidak ada

diskresi, tidak ada korupsi. Hak-hak warga dengan teknologi informasi, hak untuk mengetahui mengapa keputusan tertentu yang diambil. Penggunaan teknologi informasi yang dapat mempercepat penyebaran informasi melalui penggunaan website atau portal yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, dan opini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Direktur perusda pasar, Kepala pasar, Penjual dan Pembeli. Data sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau bahkan dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait Smart Government Melalui transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar. Di dalam pengumpulan data yang digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi

data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit pasar Pabaeng-baeng didirikan pada zaman belanda sebagai pasar tradisional yang dikelola pemda Tk.II Kabupaten Gowa dan berpindah ke Makassar karena perluasan wilayah kota Makassar pada tahun 1971 yang letaknya dijalan Sultan Alauddin Kota Ujung Pandang yang sekarang menjadi Makassar yang kurang lebih 2,5 ha luasnya, pada tahun 1995 resmi menjadi Dinas Pengelolaan pasar pada Pemda Tk. II Kota Madya Ujung Pandang. Dinas pengelolah pasar kota madya daerah Tk.II Ujung Pandang dibentuk dengan perda Kota Madya Tk. II Ujung Pandang No.11 tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Pemda Tk. II Kota Madya Ujung Pandang No.13 tahun 1995 seri D No.8 diserahkan sebagai asetnya menjadi perusahaan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya disebut perusahaan daerah. Bahwa pengelolaan pasar-pasar dalam Kota Madya Tk. II Ujung Pandang yang selama ini dilaksanakan

oleh dinas pengelolah pasar Kota Madya Daerah Tk. II Ujung Pandang sebagai keta metropolitan akan lebih baik dalam berdayaguna serta berhasil guna. Jika pengelolaannya ditangani oleh perusahaan daerah yang keberadaannya sangat dibutuhkan di wilayah daerah Tk. II Ujung Pandang dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah serta penyelenggaraan kemanfaatan umum dengan berpegang pada efisiensi dan efektifitas. sehingga perlu dibentuk dengan perusahaan daerah pasar Makassar Kota Madya, Daerah Tk. II Ujung Pandang yang telah mendapat persetujuan Menti Dalam Negeri dan surat No. 8175 tahun 21 Desember 1999 tentang struktur organisasi dan tata kerja Unit Pasar Pabaeng-baeng berdasarkan Perda No. 4 tahun1999 (Lembaga Daerah No.18 tahun 1999 seri D No.5). Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Kotamadya Daerah Tk. II Ujung Pandang tentang pendirian perusahaan daerah pasar Makassar Raya Kotamadya Tk. II Ujung Pandang yang didirikan pada tahun 1999 dengan nama PD. Pasar Makassar Raya yang berkedudukan di kota Makassar utamanya unit pasar Pabaeng-baeng berdasar Perda No. 4 tahun 1999 (lembaga daerah No.18 tahun 1999 seri D N o.5). Unit pasar Pabaeng-baeng

kota Makassar dibawah naungan perusahaan daerah Makassar raya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam pengelelaan pasar. Perusahaan daerah diselenggarakan atas azas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas pokok perusahaan daerah pada unit pasar Pabaeng-baeng kota Makassar adalah melaksanakan pekebersihan umum dalam perpasaran dalam membina perdagangan pasar, ikut membantu penerapan stabilitas harga dan kelancanran distribusi pasar dan fasilitas pasar untuk mewujudkan dan meningkatkan pekebersihan umum kepada masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan jasa sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya di bidang pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan daerah. Salah satu syarat untuk mendukung berhasilnya pengelolaan unit pasar pa'baengbaeng kota Makassar adalah adanya struktur organisasi yang baik sehingga organisasi yang bersangkutan tidak hanya mampu mempertahankan

eksistesinnya, akan tetapi tangguh melakukan penyusuaian dan perubahan yang diperlukan sehingga organisasi semakain meningkat efektifitas dan produktifiasnya disertai pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing- masing karyawan perusahaan merupakan pendorong bagi penerapan prinsip integrasi, koordinasi dalam pengelolaan organisasi. Struktur organisasi unit pa'baengbaeng kota makassar berbentuk organisasi line (garis) yang mana hubungan antra bagian yang lainnya masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Struktur organisasi unit pasar pa'baengbaeng kota Makassar terdiri dari : Direktur PD.Pasar Makassar Raya, Kepala unit pasar Pabaeng-baeng, Urusan penagihan dan pembukuan Untuk lebih jelasnya hubungan antara karyawan dan aktivitas karyawan terhadap seluruh pekerjaan yang melaksanakan. Untuk pembukuan, pengelolaan pasar, pelaksanaan atau keordinasi atau urusan administrasi dan keuangan juga bertanggung jawab pada Direktur PD. Sistem pengelolaan PD. Pasar unit pasar Pabaeng-baeng kota Makassar

memilih susunan organisasi yang terdiri: Direktur PD Pasar Makassar Raya, Kepala unit pasar Pabaeng-baeng, Urusan penagihan dan pembukuan, Urusan administrasi dan keuangan, dan Urusan kebersihan, ketertiban dan pekebersihan. Berikut ini dijelaskan secara ringkas fungsi dan tugas dan masing-masing bagian : Dirut Utama, Pasal 62 Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab direksi secara singkat dengan menyatakan “direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Dengan demikian tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: Memimpin pelaksanaan tugas perusahaan daerah pasar Makassar raya sesuai dengan aturan yang berlaku, Mewakili perusahaan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan atau mengatur dan menyerahkan secara direksi, Memberikan laporan kepada daerah melalui badang pengawas yang berupa laporan kekayaan dan operasionalnya. Kepala Unit Pasar, Membentuk direktur utama dalam Mengkoordinasikan tugas-tugas penyelenggaraan keuangan,

pelaksanaan retribusi, menjaga kebersihan dan ketertiban dan pemulihan pasar,

Mengkoordinasikan pelaksanaan pemugutan retribusi pengelolaan pasar yang menjadi tanggung jawabnya. Pasar sebagai pimpinan perusahaan daerah kota Makassar. Adapun hasil penelitian mengenai bentuk Smart Government Melalui Transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar yaitu :

Simple, Sederhana bermakna warga mengharapkan berbagai hukum, peraturan, regulasi, proses, prosedur yang diformulasi oleh pemerintah mudah dipahami dan digunakan

Keberagaman hukum, prosedur dan persyaratan yang kompleks mendorong warga menjadi perantara (mediator), sehingga mempraktekkan korupsi. Untuk menghindari situasi yaitu dengan menerapkan pemerintahan yang menggunakan layanan “*single window*” atau “*one stop service*” untuk memfasilitasi warga mendapatkan layanan yang efisien. Pihak transaksi manual dipasar Pabaeng Baeng ini merupakan salah satu pembayaran yang cepat dan mudah. Ha ini dikarenakan masyarakat disini belum memahami bagaimana

cara pembayaran dengan aplikasi barcode. Yang dimana pembayaran ini masih susah penerapannya di Pasar Pabaeng Baeng. dalam sistem pembayaran barcode disini, masyarakat belum banyak mengetahui bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut. Sehingga pembayaran barcode ini tidak berjalan maksimal sesuai yang diharapkan oleh beberapa orang. cara penggunaan aplikasi ini belum banyak yang memahami. Hal menyebabkan yaitu sosialisasi kurang serta masyarakat disini lebih memilih pembayaran yang manual karena prosesnya mudah dan cepat. Banyaknya penjual yang belum memakai smartpone, hal ini menjadikan transaksi manual tetap berjalan. kebanyakan juga pembeli di Pasar Pabaeng Baeng ini belum memahami cara penggunaan pembayaran dengan sistem barcode ini. Kurangnya sosialisasi kepada mereka membuat mereka tidak pernah memakai pembayaran dengan sistem barcode. Beberapa pihak juga tidak mau mengeluarkan dana yang lebih untuk memasarkan aplikasi ini. Smart Government Melalui Transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar. Dalam hal ini, salah satu keuntungan sistem pembayaran secara manual yaitu proses

nya yang sangat cepat dan mudah. Sehingga kebanyakan masyarakat yang saya amati di Pasar Pabaeng Baeng ini lebih memilih pembayaran yang manual jika dibandingkan dengan memakai barcode.

Moral, Smart pemerintahan bermakna munculnya sistem baru pemerintahan yang berbasis nilai-nilai moral

Kejelasan proses agak lambat tetapi sangat esensial ketahanan nilai-nilai yang diinginkan oleh prinsip good governance. Beberapa proses seperti proses yang sistematis dalam reformasi pemilihan, penyederhanaan pemerintahan, peningkatan angka melek huruf, meningkatkan kesadaran dan partisipasi dapat bertahan lama untuk menunjukkan akibat harus dapat terlewatkan. Pemeliharaan standar etika yang tinggi di dalam system pemeriksaan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi kebijakan departemen, peradilan dan administrasi secara umum. pihak memunculkan sistem pembayaran yang menggunakan aplikasi barcode. Diharapkan mampu mempermudah proses transaksi yang ada di Pasar Pabaeng-Baeng ini. tetapi penerapan ini mempunyai beberapa kekurangan yaitu masih kurang

masyarakat yang mengerti cara memakai aplikasi ini. sampai saat ini pembayaran masih menggunakan sistem manual. Ada beberapa orang saja yang menggunakan aplikasi sistem barcode ini. Kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi ini mengakibatkan penerapan aplikasi ini tidak berjalan dengan lancar. kurangnya evaluasi lanjutan mengenai sejauh mana keberhasilan aplikasi ini di masyarakat. Agar penerapan sistem ini bisa berjalan lancar dan tanpa kendala bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi di Pasar Pabaeng- Baeng. kelemahan dari sistem pembayaran barcode ini adalah manajemen pemasaran aplikasinya yang lemah sehingga sistem ini diabaikan oleh masyarakat yang ada di Pasar Pabaeng-Baeng tersebut. salah satu kerumitan aplikasi ini adalah sistem Top Up nya. Jika ingin mengisi saldo aplikasi ini, harus ke ATM untuk melakukan Top Up supaya bisa digunakan untuk proses transaksi. Smart Government Melalui Transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar. Dalam hal ini penerapan sistem pembayaran barcode di Pasar Pabaeng- Baeng ini belum maksimal. Hal ini menjadi kendala dikarenakan manajemen pemasaran aplikasi ini masih sangat lemah sehingga minat

masyarakat terhadap aplikasi ini masih sangat kurang dan sehingga lebih menguntungkan jika pembayaran secara manual.

Responsivitas, Bermakna menjadi penuh perhatian kepada kebutuhan manusia dan dengan tindakan untuk menunjukkan urgensi dalam merespon kebutuhan

Termasuk kualitas layanan yang diberikan tepat waktu. Konsep penting dikembangkan untuk memastikan daya tanggap adalah *citizen charter*. *Citizen charter* adalah seperangkat jaminan oleh lembaga pemerintah atas kualitas layanan dan batas waktu pelayanan. respon masyarakat terhadap sistem aplikasi ini masih sangat kurang sehingga masyarakat lebih memilih pembayaran yang secara langsung tanpa menggunakan aplikasi barcode tersebut. Hal ini juga dikarenakan aplikasi ini masih dinilai kurang efektif sehingga sistem ini seakan akan terbengkalai. dalam berapa sistem yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar salah satunya yaitu sistem pembayaran barcode yang sudah diterapkan di Kota Makassar. Penerapan sistem ini kurang mendapat perhatian dimasyarakat sehingga

metode pembayaran ini tidak berjalan dengan baik. respon yang baik masyarakat terhadap penerapan sistem pembayaran barcode. Akan tetapi penerapan sistem barcode ini tidak berjalan dengan baik serta masih banyak orang yang belum memahami cara pakai aplikasi ini. tidak berjalan baiknya aplikasi ini dikarenakan pihak pengelola tidak pernah mengevaluasi sampai sejauh mana program ini berjalan. ada beberapa pendapat yang mengatakan penerapan sistem pembayaran aplikasi ini hanya percuma bagi masyarakat yang melakukan transaksi dipasar Pabaeng-Baeng. sebagian besar lebih memilih pembayaran yang manual hal ini dikarenakan prosesnya cepat dan mudah, jika dibandingkan dengan pembayaran dengan sistem barcode tersebut. cara Top Up aplikasi barcode ini masih banyak yang belum mengerti, sehingga kebanyakan masyarakat tidak bisa menggunakan sistem pembayaran ini. Mereka lebih untung jika mereka pakai pembayaran secara manual. satu bulan sebelum penerapan sistem barcode ini harus ada sosialisasi agar para masyarakat dapat mengetahui terlebih dahulu cara pakai aplikasi barcode tersebut. Smart Government Melalui Transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota

Makassar. Dalam hal ini bahwa sebelum menerapkan metode pembayaran ini harusnya beberapa pihak yang terkait terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai penerapan sistem pembayaran barcode ini. Gunanya agar sistem ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga program ini menjadi tidak terbengkalai dimasyarakat.

Transparansi membawa esensi kebaikan ke dalam kehidupan publik seperti keadilan, bidang yang dimainkan, aturan hukum

Kebaikan ini memberikan manfaat untuk memberikan layanan dengan tidak ada diskresi, tidak ada korupsi. Hak-hak warga dengan teknologi informasi, hak untuk mengetahui mengapa keputusan tertentu diambil. Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat penyebaran informasi melalui penggunaan website atau portal yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, dan opini. terkait dengan indikator transparansi maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran dengan aplikasi barcode ini sering mengalami masalah jaringan sehingga dapat membuat proses transaksi bisa batal. Hal ini bisa membuat transaksi

bisa terjadi dua kali. transparansi dalam sistem pembayaran ini, kebanyakan lebih memilih pembayaran yang manual. Hal ini dikarenakan SDM disini masih sangat kurang sehingga lebih menguntungkan lewat transaksi yang manual. banyak yang menganggap pula bahwa aplikasi ini sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang melakukan pembelian di Pasar Pabaeng-Baeng ini. Kelemahan dari sistem ini salah satunya masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai aplikasi ini. sekitar 80% yang menggunakan pembayaran dengan cara manual yang menyebabkan pembayaran sistem barcode ini terbengkalai dan jarang orang yang memakainya. pemerintah yang khususnya Kota Makassar sudah menyiapkan beberapa fasilitas mengenai pembayaran dengan sistem barcode ini. Akan tetapi, sosialisasi mengenai penerapan sistem ini tidak berjalan dengan maksimal yang mengakibatkan kurangnya pemakai aplikasi tersebut. meskipun pihak pengelola pasar sudah menyiapkan beberapa fasilitas mengenai pembayaran barcode, akan tetapi sebagian masyarakat lebih memilih pembayaran yang manual karena prosesnya yang mudah dan cepat. sistem pembayaran manual merupakan salah satu hal yang

sangat mudah dilakukan dalam proses jual beli. Berbeda dengan dengan sistem pembayaran dengan aplikasi barcode yang memakai aplikasi Link Aja, akan tetapi masih banyak masyarakat disini belum memakai aplikasi tersebut. bahwa hal yang sangat diwaspadai dalam proses transaksi menggunakan sistem barcode yaitu salah satunya adalah kegagalan dalam transaksi. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian bagi para penjual yang ada di Pasar Pabaeng-Baeng. Smart Government Melalui Transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar. Dalam hal ini metode pembayaran dengan menggunakan aplikasi Link Aja menjadi salah satu hal yang bisa mengakibatkan kerugian bagi penjual hal ini dikarenakan sering mengalami kegagalan dalam proses transaksi bisa batal. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa fasilitas mengenai sistem pembayaran ini, akan tetapi pihak pengelola yang dipercayakan kurang mengfollowup bagaimana keberhasilan dalam penerapan aplikasi tersebut. Dan sampai sekarang sekitar 80% yang masih menggunakan metode pembayaran yang manual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Smart Government Melalui Transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: (1) Simple, dapat diketahui bahwa Smart Government Melalui Transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar. Dalam hal ini, salah satu keuntungan sistem pembayaran secara manual yaitu prosesnya yang sangat cepat dan mudah. Sehingga kebanyakan masyarakat yang saya amati di Pasar Pabaeng Baeng ini lebih memilih pembayaran yang manual jika dibandingkan dengan memakai barcode. (2) Moral, Kejelasan proses agak lambat tetapi sangat esensial bagi ketahanan nilai-nilai yang diinginkan oleh prinsip good governance. dapat diketahui bahwa Smart Government Melalui Transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar. Dalam hal ini penerapan sistem pembayaran barcode di Pasar Pabaeng- Baeng ini belum maksimal. Hal ini menjadi kendala dikarenakan manajemen pemasaran aplikasi ini masih sangat lemah sehingga minat masyarakat terhadap aplikasi ini masih

sangat kurang dan sehingga lebih menguntungkan jika pembayaran secara manual. (3) Responsivitas, dapat diketahui bahwa Smart Government Melalui Transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar. Dalam hal ini bahwa sebelum menerapkan metode pembayaran ini harusnya beberapa pihak yang terkait terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai penerapan sistem pembayaran barcode ini. Gunanya agar sistem ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga program ini menjadi tidak terbengkalai dimasyarakat. (4) Transparansi, dapat diketahui bahwa Smart Government Melalui Transaksi Pembayaran Sistem Barcode di Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar. Dalam hal ini metode pembayaran dengan menggunakan aplikasi Link Aja menjadi salah satu hal yang bisa mengakibatkan kerugian bagi penjual hal ini dikarenakan sering mengalami kegagalan dalam proses transaksi bisa batal. Pemerintah sudah menyiapkan beberapa fasilitas mengenai sistem pembayaran ini, akan tetapi pihak pengelola yang dipercayakan kurang mengfollowup bagaimana keberhasilan dalam penerapan aplikasi tersebut. Dan sampai sekarang sekitar 80% yang masih menggunakan metode

pembayaran yang manual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Muhammad. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Alfin , M. R., & Nurdin, S. 2014. *Pengaruh Store Atmosphere Pada Kepuasan Pelanggan Yang Berimplikasi Pada Loyalitas Pelanggan*. Jurnal Ecodemica.
- Albert Meijer. 2013. *Indonesia Governance Index 2012: Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintahan yang Responsif*. Jakarta: Rana Creative Solution.
- Aalkandari dkk 2012, "Konsep Smart City Mobility", <http://www.academia.edu>.
- Cohen, L., Manion, L., & Norisson, K. 2013. *Research Methods in Education*.
- Caragilu, A., Del Bo, C., Nijkamp, P. 2009. *Smart cities in Europe. Series Research Memoranda 0048*. VU University Amsterdam : Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics.
- Caragilu dan Del Bo 2012, *Smart Cities and a Stochastic Frontier Analysis: A Comparison among European cities*.
- Eko Indrajit, Richardus. 2004. *Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Fahri Ardiansyah Tamsir 2014 "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern", Andi Yogyakarta.
- Grimmelikhuijen, Stephan G. & Meijer Albert. 2013. *The Effect Of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization*. Oxford University.
- Griffinger, Dkk. 2012. *Smart Cities : Ranking of European Medium-Sized Cities*. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology.
- Gil- Garcia, Dkk. 2012. *Building Understanding of Smart City Initiative, Electronic Government*.